



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI JAWA BARAT (INDRAMAYU)

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021

Tanggal 26-28 November 2020

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan ketiga dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kunjungan kerja ini juga dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I-XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Leputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST/024/KOM.VI/DPR-RI/11/2020 Tanggal 23 November 2020 Tentang penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Barat (Indramayu).

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas yang beroperasi di Provinsi Jawa Barat (Indramayu).

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas

serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan persaingan usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas terkait kinerja operasional perusahaan di masa Pandemi Covid-19.

D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Indramayu) adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP. F. PKB
2	A-352	MARTIN MANURUNG, SE, MA	PIMP.F. NASDEM
3	A-179	GILANG DHIELFARAREZ, SH, LL,M	F.PDIP
4	A-229	ST. ANANTA WAHANA, SH, MH	F.PDIP
5	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F.PDIP
6	A-334	Drs. MUKHTARUDIN	F.PG
7	A-274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
8	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
9	A-115	KHILMI	F.GERINDRA
10	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F. NASDEM
11	A-447	AMIN, AK, M.M.	F.PKS
12	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F. PD
13	A-481	H. NASRIL BAHAR, SE	F.PAN
14	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Indramayu) dalam agenda pertemuan sebagai berikut:



Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas terkait kinerja operasional perusahaan di masa Pandemi Covid-19

Hasil pertemuan

Pandemi Covid-19 telah memukul sejumlah usaha dan bisnis secara merata, tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hampir 90% perusahaan BUMN terkena dampak pandemi Covid-19 seperti empat diantaranya adalah PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas.

A. PT Pertamina (Persero) – Proyek Pengembangan Kilang RU VI Balongan

Bidang industri pengilangan minyak di Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini memberikan berbagai dampak positif, yaitu terbukanya lapangan kerja, membaiknya sarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya taraf sosial ekonomi masyarakat. Di tengah Pandemi Covid-19, PT Pertamina (Persero) memastikan sejumlah proyek kilang nasional masih terus berjalan, salah satunya adalah Kilang RU VI Balongan di Indramayu Jawa Barat.


Proyek RDMP Balongan erbagi menjadi 3 fase. Pembangunan RDMP Balongan Fase 1, saat ini masih pada tahap Dual FEED Competition (DFC) dengan dua konsorsium yakni Konsorsium RRE (PT Rekayasa Industri, PT Rekayasa Engineering dan PT Enviromate Technology International) dan konsorsium JSW di antaranya JGC Indonesia, PT Synergy Engineering, dan PT Wijaya Karya.

Untuk Fase 2, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan serta memulai Revamp Studi Unit ARDHM. Sementara untuk RDMP Balongan Fase 3 (*New Refinery and Petchem Complex Jabar*), studi kelayakan akan dilakukan bersama partner dan sedang dalam penetapan lokasi serta pengadaan lahan. Progres RDMP Balongan Fase 3, yakni pengembangan kompleks kilang terintegrasi Petrokimia di Balongan, dimana Pertamina menggandeng dua perusahaan energi asing raksasa, *China Petroleum Corporation (CPC)* dan *Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)* telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan Kompleks Kilang Terintegrasi Petrokimia di Balongan, Jawa Barat yang rencananya, penggarapan kilang yang terbagi dalam tiga fase tersebut akan selesai pada 2026.

Perlu diketahui, untuk *overview* proyek RDMP RU VI Balongan Sebagian feed stock Kilang RU VI Balongan yaitu LSWR untuk unit RCC dan naphta berasal dari RU V Balikpapan Dengan berjalannya proyek RDMP RU V Balikpapan maka kelebihan LSWR dan Naphta di RU V Balikpapan tidak ada lagi karena diolah oleh RU V sendiri sehingga akan menurunkan produksi Kilang RU VI Balongan. Sementara untuk Crude yang diolah saat ini masih tergolong sweet crude dengan sulfur content 0.2 dan Kualitas Produk belum memenuhi standar internasional (masih Euro II).

Terlepas dari hal tersebut di atas, Kilang minyak tidak dapat lepas dari masalah limbah dan polusi yang timbul terutama pada lingkungan, yaitu: pencemaran air, tanah dan udara. Pengolahan minyak mentah sangat berpotensi terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan, seperti: partikel, gas karbon monoksida (CO), gas karbon dioksida (CO₂), gas belerang oksida (SO₂), Amoniak (NH₃) dan uap air. Limbah gas, padat maupun cair dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan manusia bila tidak ditangani dengan baik dan benar. Di sisi lain permasalahan proyek perluasan lahan Kilang Balongan juga menjadi masalah, mengingat masyarakat pemilik tanah yang terdampak pembangunan industri Petrokimia di Kecamatan Balongan, menuntut ganti rugi tanah dengan harga proporsional, sementara penawaran dari pihak Pertamina dinilai terlalu rendah dan tidak menguntungkan. Proyek Petrokimia Balongan rencananya dibangun tahun 2023 membutuhkan lahan mencapai sekitar 300 hektare lebih dan proyek yang merupakan perluasan dari Kilang Balongan ini, memiliki nilai investasi mencapai Rp 100 triliun.

OVERVIEW PROYEK RDMP RU VI BALONGAN



PETA RDMP RU VI BALONGAN

LATAR BELAKANG

1. Sebagian feed stock Kilang RU VI Balongan yaitu LSWR untuk unit RCC dan naphta berasal dari RU V Balikpapan. Dengan berjalannya proyek RDMP RU V Balikpapan maka kelebihan LSWR dan Naphta di RU V Balikpapan tidak ada lagi karena diolah oleh RU V sendiri sehingga akan menurunkan produksi Kilang RU VI Balongan.
2. Crude yang diolah saat ini masih tergolong sweet crude dengan sulfur content 0.2 %
3. Kualitas Produk belum memenuhi standar internasional (masih Euro II)

TUJUAN

Fase 1:

- Peningkatan kapasitas kilang dari 125 KBPD menjadi 150 KBPD
- Peningkatan fleksibilitas operasi kilang menggunakan crude **slightly sour** -0.37%

Fase 2:

- Peningkatan refinery **margin & profitability**
- Operational **flexibility** untuk menggunakan sour crude
- Improve kualitas produk bahan bakar dari **EURO II ke EURO V**

LINGKUP PEKERJAAN

Fase 1:

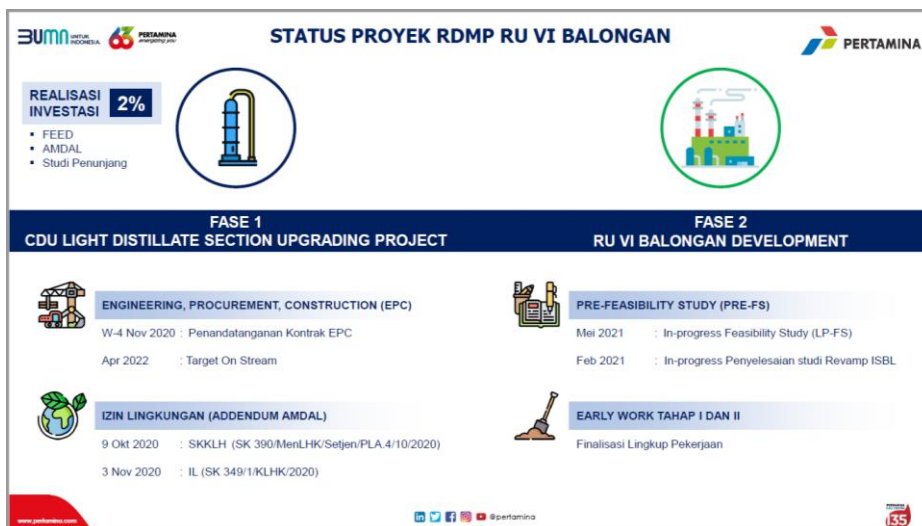
- Revamping CDU dari 125 KBPD menjadi 150 KBPD

Fase 2:

- Revamp Secondary Unit (ARDHM, KHT, DHT, RFCC, KLBB)
- Build New Unit (Alkilasi, RFCC NHT, PP)

INFORMASI KUNCI

Lokasi di **Jawa Barat**
(area dengan **permintaan pasar bahan bakar yang tinggi**)



B. PT Asabri (Persero)

Core Business PT ASABRI (Persero) adalah Pengelolaan Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemenhan dan POLRI. PT ASABRI (Persero) mengelola 4 (Program Asuransi yaitu Tabungan Hari Tua; Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun. Per akhir Oktober 2020, Peserta ASABRI di seluruh Indonesia berjumlah 1.340.207 orang, yang terdiri dari 939.413 Peserta Aktif dan 400.794 Peserta Pensiunan. Untuk Jawa Barat, Peserta Aktif berjumlah 108.396 orang dan Peserta Pensiun sebanyak 54.911 orang; atau sekitar 12% dari total Peserta.

ASABRI memiliki 3 Kantor Cabang yang melayani peserta di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kancab Cirebon yang melayani peserta yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah). Kantor Cabang Utama, selain melayani peserta DKI Jakarta juga melayani peserta yang berdomisili di Sukabumi, Bogor, dan Depok. Sedangkan untuk wilayah lain di Provinsi Jawa Barat dilayani oleh Kantor Cabang Bandung.

Dalam rangka menyukseskan serta membangun perekonomian nasional dan perekonomian Jawa Barat, ASABRI berperan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Selama perioda tahun 2015 - 2020, ASABRI telah menyalurkan dana bergulir Program Kemitraan untuk 253 Mitra Binaan dengan total penyaluran sebesar Rp 9.681.000.000; Bantuan Bina Lingkungan untuk 111 orang Mitra dengan total penyaluran sebesar Rp 3.290.527.800. Sedangkan kegiatan CSR dilakukan dalam bentuk Pembangunan Jembatan Gantung Cimalaya di Karawang, Proyek Padat Karya Tunai di Desa Sukaharja, Ciamis; dan Penyediaan Mesin Cetak Batako dengan total nilai bantuan sebesar Rp 1.163.885.000. Di samping itu, ASABRI berperan aktif dalam bantuan penanganan Covid-19 melalui Satuan Tugas COVID-19 yang dibentuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun permasalahan yang terjadi di PT Asabri (Persero), salah satunya adalah kerugian portofolio asuransi Asabri dengan penurunan asset dan ekuitas tahun 2010 diakibatkan oleh kerugian investasi (equity related) pada saham dan reksadana saham dan ekuitas negatif pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh dampak COVID-19. Saham-sama yang dimiliki PT Asabri (Persero) mengalami pertumbuhan negative dari 14 emiten yang termasuk ke dalam portofolio, sebagian besar nilainya anjlok hingga 80 persen dan kepemilikannya di atas 5 persen. Pergerakan saham-saham milik Asabri menurun drastis mulai awal 2019. Kondisi ini tentu mencerminkan kacaunya manajemen keuangan di Asabri. Sementara kerugian PT Asabri (Persero) sendiri mencapai Rp 10 Triliun.

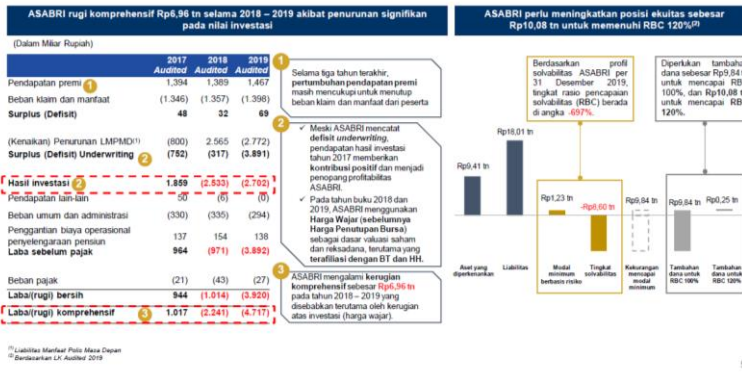
Terlepas dari kendala tersebut PT Asabri (Persero) menjalankan 5 inisiatif strategi pemulihan kondisi keuangan ASABRI selama 5 tahun kedepan, antara lain:

1. **Perbaikan Tata Kelola Investasi:** Asabri memerlukan adanya implementasi tata kelola investasi yang dijalankan dengan baik.
2. **Optimalisasi Cluster Asuransi Sosial dan Dapen:** Taspen sebagai Asuransi Sosial dan Dapen BUMN, bersama Asabri dapat melakukan optimalisasi bisnis termasuk pada pengembangan produk dan benchmarking SOP Investasi.
3. **Asset recovery dan Rebalancing Portofolio:** Pemulihan aset investasi nonproduktif senilai ±Rp11,5 tn dari HH dan BT dengan *net recovery asset* diproyeksikan sebesar Rp1,9tn, termasuk *re-investment* dengan profil risiko moderat.
4. **Penyesuaian Bunga Aktuaria:** ASABRI mengacu pada bunga aktuaria dengan perhitungan perusahaan asuransi komersial dengan tenor 18 tahun, bukan dengan perhitungan perusahaan asuransi sosial.
5. **Penerimaan UPSL:** Sesuai PMK No. 202/PMK.02/2014, Pemerintah memiliki kewajiban UPSL atas dapen PNS serta perlu menyesuaikan kondisi terkini. Hingga saat ini Pemerintah belum melakukan pembayaran.



ASABRI rugi bersih komprehensif Rp6,96 tn selama periode 2018 – 2019

ASABRI memerlukan Rp10,08 triliun untuk pemenuhan Risk-based Capital (RBC) sebesar 120%.



C. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

PT Dirgantara Indonesia (Persero), juga dikenal sebagai PTDI adalah salah satu perusahaan aerospace di Asia dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer dari pesawat ringan dan menengah. Sejak berdiri pada tahun 1976, PTDI telah melakukan delivery sebanyak 450 units pesawat terbang dan helikopter kepada banyak customer di dunia dengan berbagai macam konfigurasi, total untuk pesawat terbang mencapai 195 unit dan helikopter mencapai 225 unit.

Di tengah Pandemi Covid-19, industri dirgantara secara internasional diperkirakan turun 40% demand dikarenakan jumlah traffic penerbangan menurun drastic dan banyak perusahaan melakukan pembatalan pembelian produk pabrik pesawat PTDI. Besarnya penurunan pendapatan disebabkan negara-negara asal customer mengalami tekanan ekonomi cukup besar akibat covid-19. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi customer luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi pandemi di masing-masing negara, terutama yang jadi target dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

Dalam menghadapi pandemi ini PT Dirgantara Indonesia memiliki pengendalian manajemen dan strategi agar tetap produktif selama menghadapi pandemi. Salah satunya pihak manajerial menerapkan kebijakan work from home bagi sebagian karyawan, dan sebagian karyawan lainnya tetap melakukan produksi pembuatan pesawat dengan menjaga jarak dan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penularan virus covid-19. Dengan begitu kegiatan operasional PT Dirgantara Indonesia tetap berjalan efektif dan efisien serta mampu bertahan ditengah pandemic.

Selain strategi pencegahan penularan dilingkungan perusahaan, PT Dirgantara Indonesia juga membuat strategi kerjasama dan strategi produksi agar tetap produktif dimasa pendemi ini, dimana PT DI bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yaitu salah satunya ITB dengan berkontribusi memproduksi ventilator. Strategi produksi pembuatan ventilator ini digunakan agar Indonesia mengurangi impor ventilator dari luar negeri yang harganya ratusan juta.

Dampak Covid-19 pada sektor industri Aerospace dan Defence, antara lain:

1. Production/ Manufacturing facilities and supply chains will be affected
2. Business development, sales, and marketing activities – which are already heavily curtailed due to travel and social gathering restrictions.
3. Budgets and demand for defence equipment and related services could go down
4. Companies will have to make tough choices on product and service development that will impact future finances and competencies
5. Secondary effects due to falling economies and stock markets

D. Perum Perumnas

Perumnas berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perusahaan ini didirikan berdasarkan PP No. 29 Tahun 1974, diubah dengan PP No. 12 Tahun 1988, dan diubah kembali dengan PP No. 15 Tahun 2004, disempurnakan melalui PP No. 83 Tahun 2015. Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pionir dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah.

Menghadapi pandemi Covid-19, Perumnas berinovasi menyiapkan beragam solusi untuk memasarkan produk di area terdampak dan saat ini ada 11 proyek Perum Perumnas dengan brand proyek "Samesta". Diantaranya area Jakarta, Depok dan Tangerang terdapat Samesta Mahata Serpong Tangerang Selatan, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Alonia Jakarta dan Samesta Sentraland Cengkareng Jakarta. Selanjutnya untuk area Karawang, Purwakarta, Bogor dan Bandung terdapat Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Royal Campaka Purwakarta, Samesta Dramaga Bogor, Samesta Parayasa Bogor, Samesta Pasadana Bandung dan Samesta Antaloca Bandung.

Tak hanya itu, Perumnas juga menyiapkan beragam penawaran menarik khususnya pengajuan KPR dengan suku bunga khusus mulai dari 4,74% fixed satu tahun pertama dan diskon provisi 74%. Perumnas juga memperkuat agen penjualan, khususnya pada proyek rumah susun, dimana portofolio produk Perumnas pada segmen itu masih berkontribusi di kisaran 40%.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan pembiayaan kepada Perum Perumnas berupa Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Tahun 2020. Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor KMK 503/KM.06/2020 tanggal 9 November 2020 telah menugaskan PT Sarana Multi Griya Finansial (SMF) Persero sebagai Pelaksana Investasi untuk melakukan analisis usulan dukungan serta monitoring dan evaluasi Investasi Pemerintah PEN kepada Perum Perumnas.

Dukungan Pemerintah diberikan dalam rangka menata kembali dan memperkuat struktur keuangan perusahaan di dalam melaksanakan program Satu Juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar tidak terkendala akibat pandemi Covid-19. Dukungan sampai dengan Rp650 miliar disiapkan bagi Perum Perumnas sebagai paket Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN. Bagian pertama dari paket tersebut adalah pinjaman sebesar Rp200 miliar yang diberikan dengan maksud agar Perum Perumnas tidak terbebani dengan utang jangka pendek berbunga tinggi, yang tidak sesuai dengan karakter investasi di bidang pembangunan perumahan. Bagian kedua dari paket tersebut akan berupa pinjaman modal kerja sampai dengan Rp450 miliar, yang akan digunakan Perum Perumnas untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan perumahan yang telah berjalan.

Dengan dukungan Investasi Pemerintah PEN ini, Pemerintah juga mendorong Perum Perumnas untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan melalui sinergi, transformasi dan reposisi peran Perum Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional. Kemenkeu mengajak berbagai pihak terkait agar terus membangun sinergi dan dukungan pada upaya pembangunan perumahan khususnya bagi MBR, baik dalam hal regulasi di bidang perumahan, penyediaan infrastruktur dasar pendukung perumahan, hingga dukungan pembiayaan dari sektor keuangan seperti perbankan dan investor institusional. Dengan adanya dukungan dan sinergi ini, pelaku usaha perumahan MBR termasuk Perum Perumnas diharapkan dapat lebih berkontribusi dan mampu meningkatkan perannya dalam keseluruhan ekosistem perumahan di Indonesia.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas terkait kinerja Perusahaan di tengah Pandemi Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usahanya di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan aspirasi dari PT Pertamina (Persero), PT Asabri (Persero) PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan Perum Perumnas terkait kendala yang dihadapi perusahaan pada sat rapat kerja dengan Menteri terkait yaitu Menteri BUMN.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka peninjauan kinerja operasional perusahaan di tengah Pandemi Covid-19 pada masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

**Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Barat**

TTD

Martin Manurung, S.E., M.A.

(A-352)